

II. LANDASAN TEORI

1.1 Bank Perkreditan Rakyat

1.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU No. 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat didaerah. Bank Perkreditan Rakyat berbentuk hukum Perseorangan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat terkait dengan tujuan pelayanan utama Bank Perkreditan Rakyat kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

1.1.2 Pengaturan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberi izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional Bank Perkreditan Rakyat namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

2.1.3 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir (2003) meliputi:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan atau dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan Kredit.

- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito.

Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir (2003) adalah :

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).
- Melakukan penyertaan modal.
- Melakukan usaha perasuransian.
- Melakukan usaha di luar kegiatan usaha yang di maksud sebelumnya.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Secara umum Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan dan unit ekonomi lain yang sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dibandingkan, dan tidak menyesatkan.

Menurut Harahap (2007), terdapat empat alasan penting dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu :

1. Memberi pedoman dan peraturan bagi akuntan publik agar dapat melaksanakan tugas dengan independen, hati-hati dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujuran meliputi penyusunan laporan keuangan.
2. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kegiatan dan prestasi perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan.
3. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi dibidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak standar akuntansi yang dikeluarkan semakin banyak kontroversi dan semakin banyak usaha untuk berdebat, berpolemik dan melakukan penelitian.
4. Memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan perencanaan, pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan makro lainnya.

2.2.2 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan

- b. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Di karenakan bank merupakan badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, maka Bank Perkreditan Rakyat yang tergolong jenis bank tidak diperkenankan untuk menggunakan SAK ETAP, namun sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku regulator mengeluarkan Surat Edaran No.11/37/DKBU perihal penetapan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik bagi Bank Perkreditan Rakyat yang bertujuan untuk mempermudah dalam menerapkan standar akuntansi yang tetap mempertahankan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional. Sebelum di berlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) standar akuntansi Bank Perkreditan Rakyat adalah PSAK

31.

Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(Tsetyaernawati; 2012) yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri, dapat di audit dan mendapat opini, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapat dana (misalnya dari bank) untuk mengembangkan usaha
2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK sehingga lebih mudah dalam implementasinya
3. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Prinsip Pengakuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(Tsetyaernawati; 2012) :

- Aset diakui jika manfaat ekonomi dikemudian hari besar kemungkinan akan mengalir kepada entitas dan nilainya dapat diukur secara andal
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan entitas harus mentransfer sumber daya dikemudian hari akibat peristiwa masa lalu dan dinilainya dapat diukur dengan andal
- Pengakuan pendapatan dan beban sebagai akibat langsung pengakuan aset dan kewajiban.

Pengakuan pendapatan dan beban bunga memiliki hubungan dalam mengukur kinerja keuangan dari suatu entitas, dimana dapat dilihat dari laporan laba rugi.

Pengertian Pendapatan

Pendapatan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. (SAK ETAP paragraf 2.20(a))

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana Bank Perkreditan Rakyat pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh Bank Perkreditan Rakyat (biaya transaksi). Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen atas dasar yang ditetapkan. Entitas harus mengakui pendapatan secara accrual (SAK ETAP Paragraf 20.27(a)). Pendapatan bunga berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain dan sertifikat bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto, dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif, serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Pengertian Beban

Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanaman modal. (SAK ETAP paragraf 2.20(b))

Beban Bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya

tabungan dan deposito, termasuk premi penjamin simpanan, *cash back* dan hadiah deposito berjangka. Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga. Beban bunga diakui secara accrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban Bank perkreditan Rakyat, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah dan *cash back*, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

2.2.3 Perbedaan PSAK – SAK ETAP Secara Umum

- SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
- SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas
- SAK ETAP hanya menggunakan metode cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan property investasi sedangkan PSAK boleh memilih cost model dan model revaluasi.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan keuangan

Dalam Pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini yaitu keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan sementara untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Disamping itu dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan keuangan akan terbaca bagaimana kondisi bank sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimiliki (Kasmir, 2008)

Tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki
- b. Memberi informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang
- c. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut
- e. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu
- f. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
- g. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan.

1.3.2 Unsur-unsur Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

Adapun unsur-unsur laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat Meliputi : Komponen laporan Keuangan

- Neraca
- Laporan laba rugi
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan arus kas
- Catatan Atas laporan Keuangan

Bank Perkreditan Rakyat wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada Bank Indonesia dan penggunaan lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan BPR yang menyediakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, serta dicerminkan dalam laporan-laporan berikut ini :

a. Laporan Posisi Keuangan

Posisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuidasi, dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dimasa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, distribusi imbal hasil dan arus kas, serta kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun

jangka panjang. Informasi posisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat tergambar dalam neraca.

b. Laporan Kinerja

Laporan kinerja Bank Perkreditan Rakyat diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi selama periode pelaporan yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kepastian Bank Perkreditan Rakyat dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas Bank Perkreditan Rakyat dalam memanfaatkan sumber daya, informasi kinerja Bank Perkreditan Rakyat tergambar dalam laporan laba rugi.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi perubahan posisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat antara lain :

- Perubahan Ekuitas

Informasi perubahan ekuitas Bank Perkreditan Rakyat menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan, informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam laporan perubahan ekuitas

- Perubahan Kas dan Setara Kas

Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan Bank Perkreditan Rakyat menghasilkan arus kas serta kebutuhan Bank Perkreditan Rakyat untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas selama periode pelaporan. Informasi ini bermanfaat untuk menilai arus kas yang berasal dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan. Informasi perubahan kas dan setara kas tergambar dalam laporan arus kas.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja dan laporan perubahan posisi keuangan di berlakukan suatu penjelasan yang relevan. Penjelasan tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tambahan terhadap pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan uraian naratif atau pemisahan pos-pos laporan keuangan, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

1.3.3 Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008) Laporan keuangan yang disusun memiliki keterbatasan tertentu yaitu :

- a. Bersifat historis, yang menunjukkan transaksi dan peristiwa lampau
- b. Bersifat umum, baik dari sifat informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
- c. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran
- d. Menggunakan pertimbangan materialitas
- e. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum
- f. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang digunakan menimbulkan variasi pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kinerja antar Bank Perkreditan Rakyat

Tabel 2.1
Perbedaan Penyajian dan Perlakuan Akuntansi Sebelum dan Sesudah Implementasi SAK ETAP

No	Elemen	Sebelum Implementasi SAK ETAP (PSAK 31)	Setelah Implementasi SAK ETAP
1.	Kas Rupiah/ Valuta asing	Yang termasuk mata uang rupiah dan valas yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk penukaran.	Mata uang rupiah dan valas yang ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sehingga direklasifikasi ke dalam aset lain-lain
2	Aktiva/kas	Aktiva dalam Valas	Kas dalam valas <i>Perubahan</i>

Tabel 2.1 (Lanjutan)

No	Elemen	Sebelum Implementasi SAK ETAP (PSAK 31)	Setelah Implementasi SAK ETAP
3	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Pengklasifikasian SBI : - Dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)	Pengklasifikasian SBI : - Dimiliki hingga Jatuh tempo - Tersedia untuk dijual

		<ul style="list-style-type: none"> - Diperdagangkan (Tranding) - Tersedia untuk dijual 	<ul style="list-style-type: none"> - SBI tidak untuk diperdagangkan
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	Pendapatan bunga yang akan diterima dicatat dalam pendapatan lain-lain	Pendapat bunga yang diterima disajikan dalam pos tersendiri karena untuk menggambarkan tagihan bunga yang merupakan kegiatan utama Bank Perkreditan Rakyat
5	Kredit yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit awal= pokok kredit - Berdasarkan azas materialitas dan manfaat, provisi dan biaya transaksi dapat diamortisasi straight line - Kredit selanjutnya (outstanding credit=baki debit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit awal = pokok kredit – provisi + biaya transaksi - Provisi dan biaya transaksi diamortisasi straight line - Kredit selanjutnya = baki debit (-) unamortized provisi (+) unamortized biaya transaksi <p><i>Sesuai dengan prinsip historical cost</i></p>
6	Urutan pelunasan kredit tidak lancar	<ul style="list-style-type: none"> - Setoran debitur untuk kredit L, DPK & KL, urutan: biaya, bunga, pokok - Untuk kredit D&M, urutan: Pokok, bunga 	Setoran kredit performing untuk pelunasan bunga untuk kredit nonperforming digunakan terlebih dahulu melunasi tunggakan pokok yang telah jatuh tempo, jika ada sisa untuk pelunasan tunggakan bunga <i>Penyempurnaan</i>
7	Aset tidak berwujud	Termasuk kedalam aktiva lain-lain	Disajikan dalam pos tersendiri: aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik

Tabel 2.1 (Lanjutan)

No	Elemen	Sebelum Implementasi SAK ETAP (PSAK 31)	Setelah Implementasi SAK ETAP
8	Restrukturisasi	Penyisihan restrukturisasi	Nilai tunai dihitung dengan

	kredit	kredit yang merupakan selisih antara saldo kredit dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstribusikan	menggunakan suku bunga kontraktual yang ditentukan pada awal pemberian kredit Apabila nilai tunai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat kredit pada saat direstrukturisasi, maka selisih diakui sebagai kerugian
9	Kewajiban segera	Kewajiban segera adalah kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberian amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya	Terdapat tambahan klausula yaitu termasuk kewajiban yang telah jatuh tempo diluar utang bunga. <i>Disempurnakan dengan tambahan criteria kewajiban yang telah jatuh tempo</i>
10	Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP merupakan cadangan untuk surat-surat berharga yang menjadi aktiva produktif bank dan mengandung resiko kemungkinana tak tertagih atau macet	Hanya menggunakan istilah akun penyisihan kerugian sebagai cadangan kredit atau penempatan pada bank lain saja tidak digabungkan dalam PPAP
11	Hutang bunga	Hutang bunga dicatat dalam pos kewajiban lain-lain	Hutang bunga dicatat tersendiri dalam pos hutang bunga <i>Menggambarkan utang bunga yang merupakan kegiatan utama BPR</i>
12	Simpanan	Beban bunga diakui sesuai perhitungan tingkat bunga (kontraktual)	Beban bunga yang diakui termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya dari simpanan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip <i>historical cost</i>

Tabel 2.1 (Lanjutan)

No	Elemen	Sebelum Implementasi SAK ETAP (PSAK 31)	Setelah Implementasi SAK ETAP
----	--------	---	-------------------------------

13	Pinjaman yang diterima	<ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai nominal - Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam periode berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan - Biaya transaksi yang dapat diatribusikan diamortisasi secara straight line dan diakui sebagai beban bunga
15	Kewajiban imbalan kerja	Tidak mengatur tentang kewajiban imbalan kerja	Pencatatan kewajiban imbalan kerja sesuai dengan undang-undang berlaku dan disajikan sebagai pos tersendiri. Untuk memperjelas pencatatan (dalam praktik sebelumnya dicatat dipasiva lain-lain)
16	Beban bunga	Beban bunga diakui sebagai beban pada periode berjalan	Beban bunga termasuk kedalam beban amortisasi dan biaya simpanan yang dapat diatribusikan secara langsung.
17	Modal sumbangan	Modal yang diperoleh kembali dan sumbangan saham termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual	Sumbangan yang berasal dari pemilik Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk data atau aset lain termasuk pengembangan saham pemilik

Sumber : Bank Indonesia , (2010)

1.4 Kinerja Perbankan

2.4.1 Pengertian Kinerja

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) kinerja dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur perusahaan yang merupakan efisiensi serta efektifitas dalam mengoprasikan bisnis selama periode akuntansi tertentu.

Menurut Kasmir (2003) kinerja keuangan suatu perbankan adalah prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu perbankan.

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi reaksi bank serta pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Kinerja pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif melalui penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, probabilitas, likuiditas dan sensitifitas terhadap resiko pasar.

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan yaitu :

- Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan probabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya
- Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

1.4.2 Kinerja Perbankan

Kinerja keuangan perbankan adalah prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu perbankan (kasmir; 2003). Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat pada laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan keuangan juga menggambarkan kesehatan atau kinerja bank selama periode tertentu. Kesehatan atau kondisi keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, pemilik, pengelola (manajemen) bank, pengguna jasa bank,

Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank dan pihak lainnya. Kondisi bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya.

1.4.3 Perhitungan Kinerja Keuangan

pengukuran menggunakan rasio mengenai kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penelitian ini dapat menggunakan rasio pengukuran kinerja keuangan sesuai Standar Bank Indonesia (No. 6/23/DPNP) yang diproksikan dengan rasio permodalan (*capital*), rasio kualitas aktiva produktif (*Aset*), rasio rentabilitas (*earning*), Manajemen dan rasio likuiditas (*liquidity*) atau CAMEL. Dari rasio-rasio tersebut akan dapat diketahui tingkat kesehatan suatu bank.

Tabel 2.2
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat Komposit	Predikat	Keterangan
1	Sangat Sehat	Mencerminkan bahwa mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
2	Sehat	Mencerminkan bahwa bank mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
3	Cukup Sehat	Mencerminkan bahwa bank terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif
4	Kurang Sehat	Mencerminkan bahwa bank sensitive pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak

		memuaskan yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
5	Tidak Sehat	Mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

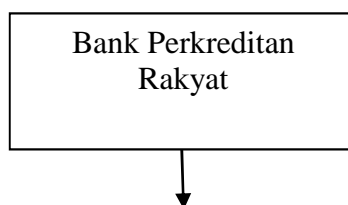
Sumber : Bank Indonesia (prihal,tata cara penilaian kesehatan bank), diolah oleh penulis (2012)

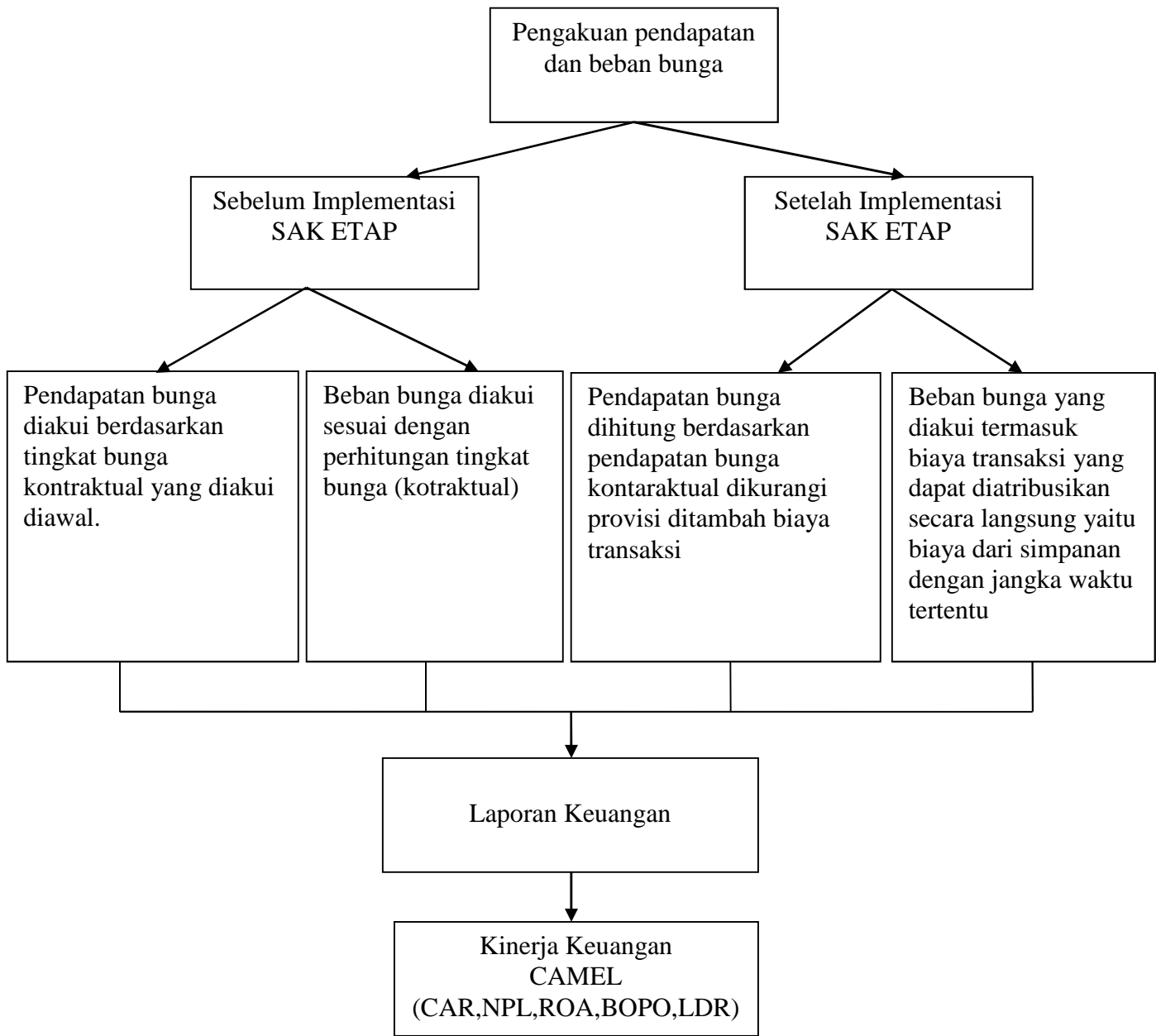
2.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu pengakuan yang diakui oleh SAK ETAP adalah pengakuan pendapatan dan beban bunga. Kredit yang diberikan adalah usaha Bank Perkreditan Rakyat untuk pendapatan bunga yang dihitung berdasarkan tingkat bunga kontraktual sementara provisi menjadi pendapatan operasional lainnya, sedangkan setelah implementasi SAK ETAP pendapatan bunga dihitung berdasarkan tingkat bunga kontraktual dikurangi dengan provisi ditambah biaya transaksi. Dari akun simpanan sebelum implementasi SAK ETAP beban bunga diakui sesuai dengan perhitungan tingkat bunga (kontraktual), sedangkan setelah implementasi SAK ETAP beban bunga yang diakui termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya dari simpanan dengan jangka waktu tertentu.

Salah satu pengakuan yang berbeda akan mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang berbeda pula dan menunjukkan perkembangan kinerja perusahaan setelah implementasi SAK ETAP.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran





Sumber : diolah penulis (2012)

2.6 Hipotesis

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan rasio keuangan perbankan yang menilai tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan, hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Indikator yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap rasio permodalan (capital) adalah CAR. Perbedaan rasio CAR sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP dapat diakibatkan oleh perbedaan pengakuan dan pengukuran pos-pos yang digunakan yaitu modal dan aktiva tertimbang menurut resiko. Sebelum implementasi SAK ETAP, tidak mengatur mengenai dana setoran modal dan mengakui adanya akun modal yang belum disetor sedangkan setelah implementasi SAK ETAP dana setoran modal adalah dana yang sudah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku namun didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk digolongkan sebagai modal disetor.

Perbedaan rasio CAR juga dapat diakibatkan oleh akun modal pinjaman yang diklasifikasikan sebagai kewajiban sementara (setelah implementasi SAK ETAP) sedangkan sebelum implementasi SAK ETAP diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Akun aktiva tertimbang menurut resiko terdiri dari kredit, surat berharga, antarbank aktiva, nilai buku inventaris dan rupa-rupa aktiva yang dikalikan dengan bobot resiko masing-masing pos. Dari pos tersebut yang memiliki perlakuan berbeda sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP adalah pengakuan dari kredit yang diberikan. Sebelum implementasi SAK ETAP kredit yang diberikan adalah kredit awal sama dengan pokok kredit sedangkan setelah implementasi SAK ETAP kredit awal sama dengan pokok kredit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi.

Sertifikat Bank Indonesia meskipun ada beberapa Bank Perkreditan Rakyat tidak memiliki Sertifikat Bank Indonesia, namun pengklasifikasian SBI memiliki perbedaan dan dapat menjadi penyebab perbedaan pengukuran kinerja keuangan. Sebelum implementasi SAK ETAP penggolongan SBI yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, diperdagangkan dan tersedia untuk dijual sementara pengklasifikasian SBI setelah implementasi SAK ETAP adalah dimiliki hingga jatuh tempo yang biaya perolehannya diakui sebesar harga beli (termasuk diskonto) ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan sementara. SBI tidak untuk dijual.

2. Indikator yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap faktor kualitas aktiva produktif (*asset*) adalah NPL. Komponen yang digunakan untuk menghitung rasio NPL adalah debitor yang kurang lancar, diragukan dan macet. Sebelum implementasi SAK ETAP urutan pelunasan kredit tidak lancar untuk kredit D&M adalah pokok dan bunga sedangkan setelah implementasi SAK ETAP setoran kredit performing digunakan untuk pelunasan bunga, untuk kredit nonperforming digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok yang telah jatuh tempo, jika ada sisa untuk pelunasan tunggakan bunga.

Selanjutnya perbedaan juga dapat diakibatkan oleh akun penyisihan restrukturisasi kredit berdasarkan SAK ETAP nilai tunai dihitung dengan menggunakan suku bunga kontarktual yang ditentukan pada awal pemberian kredit dan apabila nilai tunai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat kredit pada saat direstrukturisasi, maka selisih diakui sebagai kerugian sedangkan sebelum SAK ETAP penyisihan restrukturisasi kredit merupakan selisih antar

saldo kredit dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan, disajikan sebagai pos pengurangan dan kredit yang direstrukturisasi.

3. Indikator yang dapat digunakan untuk menghitung rasio rentabilitas (*earning*) adalah ROA dan BOPO. Perbedaan nilai ROA sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP disebabkan oleh perbedaan pengakuan dan pengukuran komponen yang digunakan yaitu total aset yang berasal dari penjumlahan dan pengurangan akun-akun aktiva. Dari akun-akun tersebut yang memiliki perbedaan perlakuan akuntansi sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP adalah akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Sebelum implementasi SAK ETAP PPAP merupakan istilah pencadangan untuk surat-surat berharga yang juga menjadi aktiva produktif bank yang disamping menghasilkan juga mengandung resiko kemungkinan tak tertagih atau macet, sedangkan setelah implementasi SAK ETAP digunakan akun penyisihan kerugian sebagai cadangan untuk kredit atau antarbank aktiva tidak digabung dalam PPAP.

Selanjutnya perbedaan juga dapat diakibatkan dari pos laba sebelum pajak yaitu dilihat dari pengakuan pendapatan bunga sebelum implementasi SAK ETAP pendapatan bunga diukur berdasarkan tingkat bunga kontraktual yang diakui awal, sementara provisi diakui sebagai pendapatan operasional lainnya, dan beban bunga diakui sebagai beban pada periode berjalan, setelah implementasi SAK ETAP pendapatan bunga dihitung berdasarkan pendapatan bunga kontraktual dikurangi dengan provisi ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dan beban bunga termasuk beban amortisasi biaya simpanan yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perbedaan nilai BOPO diakibatkan oleh perubahan komponen pendapatan operasional dan beban operasional. Perbedaan Pendapatan operasional berasal dari pendapatan bunga (bunga kontraktual dikurangi provisi ditambah biaya transaksi), sementara sebelum SAK ETAP pendapatan bunga diperoleh dari pengakuan pendapatan bunga (berdasarkan suku bunga kontraktual).

Beban Operasional sebelum implementasi SAK ETAP berasal dari perbedaan perlakuan beban bunga yang diakui sebagai beban pada periode berjalan, setelah implementasi SAK ETAP pengertian beban bunga termasuk beban amortisasi dan biaya simpanan yang dapat diatribusikan secara langsung.

4. Indikator yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap rasio likuiditas yaitu menggunakan rasio LDR. Perbedaan nilai rasio LDR sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP diakibatkan oleh komponen yang digunakan, LDR dihitung dari perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga, dana pihak ketiga yang dimaksud adalah simpanan pihak ketiga (tabungan dan deposito), antarbank pasiva, pinjaman yang akan diterima, dan modal inti. Perbedaan komponen dana pihak ketiga sebelum implementasi SAK ETAP terlihat dari pengukuran akun simpanan yaitu beban bunga simpanan diakui sesuai dengan perhitungan tingkat bunga (kontraktual), sementara berdasarkan SAK ETAP beban bunga yang diakui termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya dari simpanan dengan jangka waktu tertentu hal ini sesuai dengan prinsip historical cost.

Dengan diterapkannya SAK ETAP pada Bank Perkreditan Rakyat akan membantu kinerja keuangan Bank semakin membaik karena SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan

PSAK sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Penerapan SAK ETAP bagi Bank Perkreditan Rakyat juga tidak memerlukan biaya yang sebesar seperti pada penerapan PSAK 31 atau PAPI (sebelum implementasi SAK ETAP) yang harus membeli program aplikasi bank. Dalam Implementasi SAK ETAP Bank Perkreditan Rakyat tidak membeli program aplikasi seperti implementasi sebelumnya sehingga Bank Perkreditan Rakyat dapat meminimalisir pengeluaran bank.

Dari hasil penjelasan diatas implementasi SAK ETAP dapat memperbaiki tingkat kinerja Bank Perkreditan Rakyat karena aktifitas yang digunakan dibedakan dengan aktifitas bank umum yang memerlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah :

H = Terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP

H₁ = CAR memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP

H₂ = NPL memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP

H₃ = ROA memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP

H₄ = BOPO memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP

H₅ = LDR memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP